

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PENINGKATAN MUTU PENGUATAN KAPASITAS PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

1. Nama SKPD : Dinas Kesehatan
2. Program : Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
4. Lokasi Kegiatan : Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sumber Dana : DAK NF AKREDITASI Tahun 2023
6. Jumlah Anggaran : 127.260.000
7. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - b. Capaian Program: Terlaksananya Survei Akreditasi Puskesmas
 - c. Masukan : Jumlah Dana
 - d. Keluaran : 9 Lokus
 - e. Hasil : Meningkatnya Mutu Puskesmas
8. Kelompok Sasaran : Admen, UKM dan UKP

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin, yang salah satu indikatornya adalah tingginya derajat kesehatan dan tingginya mutu kehidupan. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaan, disamping aspek spiritual. Oleh karena itu pembangunan kesehatan ditujukan guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Salah satu Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu: ***"Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan"*** dengan menerapkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Keadaan ini dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta

penerapan teknologi kesehatan secara tepat oleh petugas-petugas kesehatan yang didukung oleh peran serta aktif dari semua unsur dan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan: ***"Terwujudnya Masyarakat yang Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan"***, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu : ***"Paradigma Sehat"*** yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan Pembinaan Mutu oleh pihak eksterna yaitu TPCB dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu Instrumen TPCB melalui mekanisme Akreditasi. Kondisi saat ini dari 21 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan 20 (dua puluh) Puskesmas sudah memiliki status terakreditasi, tahun 2023 dilakukan penguatan kapasitas FKTP melalui Pemantauan Mutu di Puskesmas yang dilakukan oleh Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan (TPCB).

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 22 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2425/MENKES/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
8. Kepmenkes RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas;
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Dekon Tugas Pembantuan tahun 2013
11. Peraturan Menteri Keuangan No 32 tahun tentang revisi RKAKL Anggaran Tahun 2013
12. Permenkes No.46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat praktek Mandiri Dokter dan Tempat praktik mandiri dokter gigi.
13. Permenkes No.44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas
14. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 tahun 2019 tentang Puskesmas
15. Permenkes No.2 Tahun 2022 tentang Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang Kesehatan.

b. Gambaran Umum

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan Pengakuan terhadap hasil dari Proses Penilaian eksternal oleh Komisi Akreditasi FKTP, untuk menilai apakah sistem manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas. Menu kegiatan Akreditasi Puskesmas yang sudah dilaksanakan adalah Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi yang berupa dan

Pencegahan dan Pengendalian Workshop Audit Internal dan Keselamatan Pasien, Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi dan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Workshop tersebut sudah diikuti oleh seluruh Puskesmas. Sedangkan Peningkatan dan Penilaian Mutu Internal (PPMI) belum ada dilakukan. Kegiatan PPMI berupa Pembinaan Mutu, persiapan penilaian Akreditasi, dan Monev Mutu Akreditasi. Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal Dinas Kesehatan Kabupaten dilakukan pada Puskesmas Barung-Barung Belantai, Tarusan, Koto Berapak, Pasar Baru, Lumpo, Pasar Kuok, Kambang, Koto Baru, dan Balai Selasa di tahun 2023.

B. PENERIMAAN MANFAAT.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap system manajemen, system manajemen mutu dan system penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko di Puskesmas.

C. JENIS KEGIATAN

Target dari kegiatan Akreditasi adalah dilakukan Penguatan Kapasitas Puskesmas melalui penguatan Mutu di Puskesmas dengandilaksanakannya Pertemuan Program di Kabupaten, Pelatihan, dan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi, Peningkatan kapasitas Mutu melalui Pemantauan Mutu di Puskesmas dan Peningkatan Penilaian Mutu Internal (PPMI) berupa penilaian yang dilakukan oleh Tim Pembina Mutu Kabupaten. Semua Puskesmas akan dilaksanakan Survei Re-akreditasi dan Pendampingan Pasca Akreditasi oleh TPCB di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023. Adapun sasarannya adalah Peningkatan mutu dan kinerja pada 20 Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan meliputi Bimbingan teknis dan Pertemuan Akreditasi yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping (TPCB) Kabupaten, Kegiatan Peningkatan Mutu Akreditasi dilakukan oleh Tim Dinas Kesehatan Kabupaten. Serta Monev Mutu dan Akreditasi oleh Tim Pembina Mutu di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Mutu Puskesmas pada tahun 2023 dilaksanakan pada 9 (sembilan) Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan. Waktu pelaksanaannya dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2023.

3. KURUN WAKTU PENCAPAIAN PELAKSANAAN KELUARAN

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan mutu Akreditasi pada 20 Puskesmas di kabupaten Pesisir Selatan dan juga terlaksananya Penilaian Re Akreditasi terhadap Puskesmas yang Sudah Terakreditasi Perdana.

Jadwal dan batasan waktu pelaksanaan kegiatan Pemantauan Mutu Puskesmas ini dari Pendampingan Sampai Survey Akreditasi dan Re Akreditasi direncanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

**Matriks Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas
Puskesmas Melalui Pemantauan Mutu
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**

[illegible]

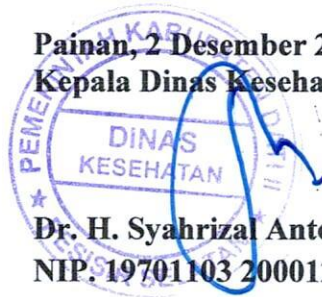
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sumber Pembiayaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Untuk kegiatan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 diusulkan alokasi dana ***Rp.127.260.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)*** yang berasal dari anggaran DAK NF 2023.

Painan, 2 Desember 2022

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pessel



Dr. H. Syahrizal Antoni SY, MPH

NIP. 19701103 200012 1 001